

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Isabella¹⁾, Ferdiansyah²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

Jl. Jend. Sudirman No.629 Palembang

²⁾Jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang

Email :isabella@uigm.ac.id¹⁾, ferdiansyah@unsri.ac.id²⁾

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine how the Index of Press Independence in South Sumatra in 2021. The research method used in this study is to use a purposive survey. This survey was conducted on a group of experts in the media/press field as many as 10 expert informants. The results of the analysis of this research In general, the 2021 Press Independence Index (IKP) of South Sumatra Province is in the "Free Enough" category with a score of 81.03. The value increased by 1.88 points compared to the previous year, which was 79.15. The trend of the IKP value of South Sumatra Province has increased starting in 2020. At that time, the increase reached 5.05 points compared to 2019. Since 2018, the IKP of South Sumatra Province has always been in the "Free Enough" category, there are two conditions whose values have increased compared to the previous year. Namely, the value of the Physical and Political Environment (3.73 points) is in the "Free Enough" category with a score of 82.69. compared to last year, which was 78.97. The Economic Environment Condition in the 2021 IKP South Sumatra Province is in the "Free Enough" category with a score of 80.09. The value increased by 0.95 points compared to 2020, which was 79.14. Last year, the Economic Environment experienced a significant increase in value of up to 7.70 points. IKP 2021 Legal Environmental Conditions South Sumatra Province is again in the "Free Enough" category with a score of 78.56. However, its value decreased by 0.82 points compared to 2020, which was 79.37.

Keywords : *Press Freedom Index, Journalist, Expert Informants*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive survei. Survei ini dilakukan terhadap kelompok ahli dibidang media/pers sebanyak 10 orang informan ahli.. Hasil analisis dari penelitian ini Secara umum, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori "Cukup Bebas" dengan nilai 81,03. Nilainya meningkat 1,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 79,15. Tren nilai IKP Provinsi Sumatera Selatan meningkat dimulai sejak tahun 2020. Ketika itu peningkatannya mencapai 5,05 poin dibandingkan tahun 2019. Sejak 2018, IKP Provinsi Sumatera Selatan selalu berada dalam kategori "Cukup Bebas" ada dua kondisi yang nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni, nilai Lingkungan Fisik dan Politik (3,73 poin) berada dalam kategori "Cukup Bebas" dengan nilai 82,69. dibandingkan tahun lalu, yakni 78,97. Kondisi Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori "Cukup Bebas" dengan nilai 80,09. Nilainya meningkat 0,95 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,14. Tahun lalu, Lingkungan Ekonomi mengalami peningkatan nilai cukup signifikan hingga 7,70 poin. Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori "Cukup Bebas" dengan nilai 78,56. Namun, nilainya menurun 0,82 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,37.

Kata Kunci : *Indeks Kemerdekaan Pers, Wartawan, Informan Ahli*

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan pers di Indonesia tidak terlepas peran Dewan Pers Indonesia sebagai lembaga independen yang didirikan oleh negara untuk mengawasi perkembangan media massa. Pers merupakan sebagai kontrol agar terciptanya *check and balance*. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2021 merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan Pers periode Januari sampai dengan Desember 2020. Survei penyusunan IKP 2021 dilaksanakan di 34 provinsi dengan 12 Informan Ahli pada setiap provinsi. Dua belas Informan Ahli tersebut terdiri dari tiga orang dari Pengurus Aktif Organisasi Wartawan, tiga orang dari Pimpinan Perusahaan Pers, tiga orang dari unsur Pemerintah, dan tiga orang dari unsur masyarakat. Nilai IKP provinsi telah divalidasi oleh lima anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council/NAC*) untuk menghasilkan nilai IKP Nasional 2021.

Kemerdekaan pers diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Pentingnya kemerdekaan pers ini dinyatakan dengan kalimat spesifik dalam UU Pers “bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin”. Idealnya, UU Pers ini mampu menciptakan kondisi lingkungan fisik, politik, ekonomi, maupun hukum yang menjamin sistem pers nasional yang bebas dan bertanggungjawab. Ditegaskan juga dalam pertimbangan UU Pers ini bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, dinyatakan bahwa “pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga memiliki kedudukan penting, dan penting pula diketahui sejauh mana pelaksanaannya. Bahkan disebutkan pula bahwa kemerdekaan pers ini merupakan hak asasi manusia (HAM) yang sangat hakiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di sini

terdapat hubungan erat antara kemerdekaan pers sebagai sebuah wujud kedaulatan rakyat dan kemerdekaan pers sebagai sebuah pilar di negara demokratis. Bahkan dalam konteks lebih luas, perlu dinyatakan bahwa “pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pelaksanaan penelitian IKP ini memiliki empat tujuan utama yaitu pemetaan perkembangan kemerdekaan pers, sumbangan bagi upaya mendorong kesadaran publik tentang pers khususnya di Sumatera Selatan, mengidentifikasi prioritas untuk perbaikan kualitas pers (merumuskan formulasi agenda untuk meningkatkan kualitas pers di Sumatera Selatan), dan tersedia data untuk mendukung advokasi pers yang sebesar-besarnya demi kepentingan publik (Dewan Pers:2016).

Secara umum, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan peningkatan-peningkatan nilai indeks setiap tahunnya. Tren nilai IKP Provinsi Sumatera Selatan meningkat dimulai sejak tahun 2020. Ketika itu peningkatannya mencapai 5,05 poin dibandingkan tahun 2019. Sejak 2018, IKP Provinsi Sumatera Selatan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di ambil rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan Tahun 2021? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan Tahun 2021.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

- 1) Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan keilmuan untuk peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan indeks kemerdekaan pers di Sumatera Selatan.
- 2) Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait mengenai kondisi perkembangan media dan para jurnalis khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkembangan media di Indonesia.

2. Pembahasan

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 1 ayat (1) : Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan, informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara, dan gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; dan pada ayat (3) di jelaskan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai

hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

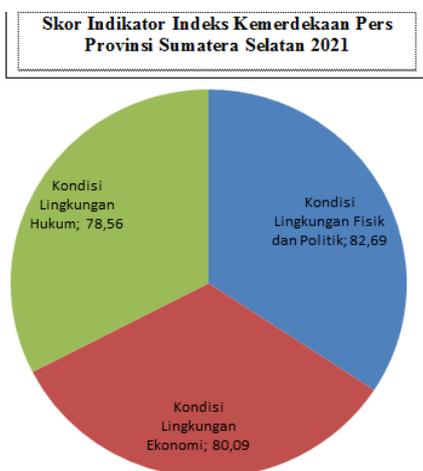
Indeks kemerdekaan ini menggunakan konsep yang melihat kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia Kemerdekaan Pers merupakan bagian dari Kemerdekaan Menyatakan Pikiran dan Pendapat sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga memiliki kedudukan penting, dan penting pula diketahui sejauh mana pelaksanaannya, adanya hubungan erat antara kemerdekaan pers sebagai sebuah wujud kedaulatan rakyat dan kemerdekaan pers sebagai sebuah pilar di negara demokratis. Bahkan dalam konteks lebih luas, perlu dinyatakan bahwa “pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Secara umum, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,03. Nilainya meningkat 1,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 79,15. Tren nilai IKP Provinsi Sumatera Selatan meningkat dimulai sejak tahun 2020. Ketika itu peningkatannya mencapai 5,05 poin dibandingkan tahun 2019. Sejak 2018, IKP Provinsi Sumatera Selatan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Melalui analisis hasil Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan pada tahun 2021 dapat dilihat berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, Kondisi Lingkungan Ekonomi dan Kondisi Lingkungan Hukum. Hasil IKP 2021 dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 1. Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan 2021



Sumber : Buku Dewan Pers 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat Tahun ini, ada dua kondisi yang nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni, nilai Lingkungan Fisik dan Politik (3,73 poin) berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,69. dibandingkan tahun lalu, yakni 78,97. Kondisi Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,09. Nilainya meningkat 0,95 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,14. Tahun lalu, Lingkungan Ekonomi mengalami peningkatan nilai cukup signifikan hingga 7,70 poin. Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,56. Namun, nilainya menurun 0,82 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,37.

Pembahasan mengenai analisis masing-masing indikator dapat dilihat pada penjelasan berikut:

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,69. Nilainya meningkat 3,73 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 78,97. Sejak 2018, Lingkungan Fisik dan Politik selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. nilai tertinggi adalah Pendidikan Insan Pers (87,08). Sementara indikator dengan nilai terendah ditempati oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (78,71). Peningkatan nilai terlihat diantaranya pemda ikut mendukung keragaman kepemilikan media. Meskipun tidak ikut mendorong keragaman kepemilikan media. Selanjutnya masing-masing indikator utama mempunyai sub indikator. Untuk indikator Lingkungan Fisik dan Politik, sub indikatornya terdiri dari 1) Kebebasan berserikat; 2) Kebebasan dari Intervensi; 3) Kebebasan dari Kekerasan; 4) Kebebasan Media Alternatif; 5) Keragaman Pandangan; 6) Akurat dan Berimbang; 7) Akses Informasi Publi; 8) Pendidikan Insan Pers; dan 9) Kesetaraan Kelompok Rentan. Rata-rata skor pada setiap sub indikator Lingkungan Fisik dan Politik ini, mengalami peningkatan skor yang diberikan oleh informan ahli. Kenaikan skor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. Lingkungan Fisik dan Politik IKP Sumatera Selatan 2018-2021

No	Indikator	Rata-Rata				Kategori				Kemajadian/Perubahan		
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	82,48	76,56	80,14	84,85	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-5,92	+3,58	+4,72
2	Kebebasan dari Intervensi	81,25	73,92	81,39	82,15	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	7,33	+7,47	+0,76
3	Kebebasan dari Kekerasan	81,58	77,56	83,52	82,56	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-4,02	+5,96	-0,96
4	Kebebasan Media Alternatif	83,21	75,54	79,67	84,50	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-7,67	+4,13	+4,83
5	Keragaman Pandangan	84,69	75,95	71,63	83,69	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-8,74	-4,32	+12,06
6	Akurat dan Berimbang	81,58	72,55	77,78	81,14	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-9,03	+5,23	+3,36
7	Akses atas Informasi Publik	77,89	80,06	79,03	82,13	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-2,17	-1,03	+3,10
8	Pendidikan Isian Pers	74,08	79,91	82,22	87,08	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	+5,83	+2,31	+4,86
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	68,72	71,33	72,69	78,71	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	+2,61	+1,36	+6,02
Rata-rata Lingkungan Fisik dan Politik		79,28	75,65	78,97	82,69	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-3,63	+3,32	+3,73

Sumber : Laporan IKP Sumatera Selatan 2021

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila dibandingkan dengan nilai tahun lalu, ada delapan dari sembilan indikator mengalami peningkatan. Tahun ini indikator yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Keragaman Pandangan (12,06 poin), diikuti oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (6,02 poin), dan Pendidikan Isian Pers (4,86 poin). Sementara itu, satu-satunya indikator yang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu adalah Kebebasan dari Kekerasan (0,96 poin).

- Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,85. Nilainya meningkat 4,72 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 80,14.
- Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan, seperti pada tahun sebelumnya, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,15. Nilainya meningkat tipis 0,76 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 81,39. Indikator ini tercatat mengalami peningkatan nilai tertinggi 7,47 poin pada tahun 2020.
- Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,56. Namun, tahun ini nilainya menurun 0,96 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 83,52. Padahal tahun lalu, indikator ini tercatat mengalami peningkatan nilai yang cukup tinggi, yakni 5,96 poin.
- Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,50. Tahun ini, nilainya meningkat 4,83 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,67.
- Indikator Keragaman Pandangan IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,69. Nilainya meningkat signifikan hingga 12,06 poin dibandingkan tahun lalu, 71,63. Peningkatan nilai ini sekaligus yang tertinggi sejak 2018, setelah selama dua tahun berturut-turut nilainya selalu mengalami penurunan.
- Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,14. Nilainya meningkat 3,36 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 77,78.
- Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,13. Nilainya

meningkat 3,10 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,03. Tahun lalu, nilainya sempat menurun 1,03 dibandingkan 2019.

- Indikator Pendidikan Isian Pers kembali IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,08. Tahun ini nilainya meningkat 4,86 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 82,22.
- Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,71. Nilainya meningkat 6,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 72,69. Tren indikator ini terus meningkat setiap tahun dan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Kecuali pada tahun 2018, Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Agak Bebas”.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,09. Nilainya meningkat 0,95 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,14. Tahun lalu, Lingkungan Ekonomi mengalami peningkatan nilai cukup signifikan hingga 7,70 poin. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman Kepemilikan (84,50). Sementara nilai terendah adalah indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (76,89). Peningkatan terlihat diantaranya kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu. Dengan demikian, konten pemberitaan di media makin beragam. Selanjutnya pada konsisi lingkungan Ekonomi pers di Sumatera Selatan menggunakan lima sub indikator yang terdiri dari :1) Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers; 2) Independensi dari Kelompok Kepentingan; 3) Keragaman Kepemilikan; 4) Tata Kelola Perusahaan Pers; 5) Lembaga Penyiaran Publik. Berikut gambaran umum nilai rata-rata di tiap sub indikator Lingkungan Ekonomi :

Gambar 3. Lingkungan Ekonomi IKP Sumatera Selatan 2018-2021

No	Indikator	Rata-Rata				Kategori				Kemajadian/Perubahan		
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	79,34	71,98	78,89	81,52	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-7,36	+6,91	+2,63
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	76,42	67,44	76,06	79,44	Cukup Bebas	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-8,98	+10,82	+1,38
3	Keragaman Kepemilikan	80,45	80,08	83,75	84,50	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-0,37	+3,67	+0,75
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	77,23	70,81	76,48	76,89	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-6,42	+5,67	+0,41
5	Lembaga Penyiaran Publik	80,96	74,90	81,43	81,36	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-6,06	+6,53	-0,07
Rata-rata Lingkungan Ekonomi		78,11	71,44	79,14	80,09	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-6,67	+7,70	+0,95

Sumber : Laporan IKP Sumatera Selatan 2021

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, empat dari lima indikator mengalami peningkatan nilai. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (2,63 poin), diikuti oleh Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (1,39 poin), Keragaman Kepemilikan (0,75), lalu Tata Kelola Perusahaan yang Baik (0,41 poin). Sementara itu, satu-satunya indikator yang nilainya menurun dibandingkan tahun lalu adalah Lembaga Penyiaran Publik (0,07 poin). Semua indikator Lingkungan Ekonomi, tahun ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman Kepemilikan (84,50). Sementara nilai terendah adalah indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (76,89).

- Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,52. Nilainya meningkat 2,63 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 78,89. Indikator ini tercatat mengalami peningkatan nilai tertinggi hingga 6,91 poin pada tahun 2020.
- Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,44. Nilai tersebut meningkat 1,39 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 78,06. Tahun lalu, indikator ini meningkat signifikan hingga 10,62 poin. Nilai tersebut menempatkan indikator tersebut ke dalam kategori “Cukup bebas”, setelah pada tahun 2019 sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”.
- Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,50. Nilainya meningkat 0,75 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 84,50.
- Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,89. Nilainya meningkat 0,41 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 76,48. Padahal tahun lalu, nilai IKP untuk indikator ini meningkat hingga 5,67 poin dibandingkan 2019. Sejak 2018, indikator ini selalu berada dalam kondisi “Cukup Bebas”.
- Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,36. Namun, nilainya menurun 0,07 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 81,43. Tahun lalu, nilai IKP untuk indikator ini meningkat hingga 6,53 poin dibandingkan 2019.

C. Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,56. Namun, nilainya menurun 0,82 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,37. Tahun lalu, nilai Lingkungan Hukum mencatat peningkatan tertinggi hingga 5,94 poin pada tahun 2020. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah

subindikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (82,77), sementara nilai terendah kategori “Agak Bebas” adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dengan nilai 67,92. Penurunan nilai terlihat diantaranya tidak ada kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers di Provinsi Sumatera Selatan. Meski tidak memungkiri masih ditemukan sejumlah wartawan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi atau ada pembatasan dengan alasan untuk keamanan wilayah atau negara. Selain penurunan nilai, belum adanya regulasi tentang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

Gambar 4. Lingkungan Hukum IKP Sumatera Selatan 2018-2021

No	Indikator	Rata-Rata				Kategori				Perubahan/Penurunan		
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	86,08	75,63	78,47	81,00	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-10,45	+2,84	+2,53
2	Kebiasaan Mempraktikkan Jurnalisme	80,42	79,55	75,00	79,33	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-0,87	-4,55	+4,33
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	88,08	73,13	86,94	82,77	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-14,95	+13,81	-4,17
4	Etika Pers	78,92	77,82	82,50	79,33	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-1,10	+4,68	-3,17
5	Mekanisme Pemulihan	65,45	76,41	81,30	80,32	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	9,94	+4,89	-0,98
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50,36	64,64	66,67	67,92	Kurang Bebas	Agak Bebas	Agak Bebas	Agak Bebas	+14,28	+2,03	+1,25
	Rata-rata Lingkungan Hukum	78,09	73,43	79,37	78,56	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	-4,66	+5,94	-0,82

Sumber : Laporan IKP Sumatera Selatan 2021

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada tiga indikator yang nilainya meningkat. Indikator yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (4,33 poin), diikuti oleh Independensi Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (2,53 poin), dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (1,25 poin). Sementara tiga indikator yang lain nilainya menurun. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi dibandingkan tahun lalu adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (4,17 poin). Diikuti oleh Etika Pers (3,17 poin), lalu Mekanisme Pemulihan (0,98 poin).

- Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan. Ada terdapat empat sub indikator semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain (82,50). Sementara skor terendah adalah aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (79,58).
- Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,33. Tahun ini, nilainya meningkat hingga 4,33 poin dibandingkan 2020, yakni 75,00. Setelah selama dua

tahun berturut-turut sejak 2018, trennya terus menurun dari 0,87 poin hingga 4,55 poin.

- Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,77. Namun, tahun ini nilainya menurun 4,17 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 86,94. Padahal tahun lalu, nilai IKP untuk indikator ini meningkat signifikan hingga 13,81 poin, atau tertinggi sejak 2018.
- Indikator Etika Pers IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan, seperti tahun-tahun sebelumnya, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,33. Nilainya meningkat 2,22 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 82,50.
- Seperti pada tahun sebelumnya, indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,32. Namun, tahun ini nilainya menurun 0,98 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 81,30.
- Seperti tahun-tahun sebelumnya, indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan masih belum beranjak dari kategori “Agak Bebas” dengan nilai 67,92. Nilainya meningkat 1,25 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 66,67. Indikator ini pernah berada dalam kategori “Kurang Bebas” pada tahun 2018.

3. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan hasil analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa pada ketiga indikator utama yang terdiri dari lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum, memiliki skor yang bervariasi. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,03. Nilainya meningkat 1,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 79,15. Tren nilai IKP Provinsi Sumatera Selatan meningkat dimulai sejak tahun 2020. Ketika itu peningkatannya mencapai 5,05 poin dibandingkan tahun 2019. Sejak 2018, IKP Provinsi Sumatera Selatan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun 2021 ini, ada dua kondisi yang nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni, nilai Lingkungan Fisik dan Politik (3,73 poin) berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,69. dibandingkan tahun lalu, yakni 78,97. Kondisi Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,09. Nilainya meningkat 0,95 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,14. Tahun lalu, Lingkungan Ekonomi mengalami peningkatan nilai cukup signifikan hingga 7,70 poin. Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,56. Namun, nilainya

menurun 0,82 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,37.

B. Saran

Meskipun di Sumatera Selatan Indeks Kemerdekaan Pers cenderung naik, namun tetap ada beberapa subindikator yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya perhatian dari berbagai pihak baik pelaku media itu sendiri, swasta, pemerintah tidak terkecuali Dewan Pers. Dalam hal ini sosialisasi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, maupun peraturan lainnya yang berkenaan dengan pemberitaan di media. Seiring dengan kemerdekaan pers, wartawan/jurnalis juga harus tetap mematuhi Kode Etik Jurnalistik, memperhatikan etika dan moral dalam melakukan peliputan berita. Hal lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah akses informasi bagi penyandang disabilitas. Sampai saat ini belum ada kebijakan khusus di Sumatera Selatan yang mengatur tentang akses informasi bagi penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- [1] Backlund, Bunyamin, 2019, The government is watching don't step on their toes (An Investigation of the Press Freedom and the Working condition for journalist in Tanzania), UEMA University, Swedia.
- [2] Fuqoha, F., Firdausi, I. A., & Sanjaya, A. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 75.
- [3] Mahadewi, K., Rideng, I. W., & Widiati, I. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak. Sebagai Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Kemerdekaan Pers. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 233- 237.
- [4] Indeks Kemerdekaan Per 2016, Dewan Pers, Jakarta 2016.
- [5] Isabella, 2016, Laporan Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan.
- [6] Panduan Indeks Kemerdekaan Pers, Dewan Pers, Jakarta 2015
- [7] Reporter Sans Fronteir Website (online). Available: <https://rsf.org/fr/node/42286>.
- [8] Survei Indeks Kemerdekaan Per 2017, Dewan Pers, Jakarta 2017.
- [9] Sobri, M.Kiagus dkk, 2017, Laporan Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan.
- [10] Saptohadi, Satrio, 2011, Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia, Volume 11, No.1, Jurnal Dinamika Hukum.
- [11] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.